

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA KEPADA NEGARA ANGGOTA FIVE POWER DEFENCE ARRANGMENTS (MALAYSIA, SINGAPURA, AUSTRALIA, SELANDIA BARU, INGGRIS) TAHUN 2000-2017

INDONESIA'S DEFENCE DIPLOMACY TO THE MEMBER STATES OF THE FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENTS (MALAYSIA, SINGAPORE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, AND UK) YEAR 2000 – 2017

Felicia Permata Hanggu¹, Leonard Hutabarat², Setyo Harnowo³
Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(felita.speranza@gmail.com)

Abstrak -- Indonesia telah lama menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan kelima negara anggota FPDA (Inggris Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura), namun hubungan ini masih ditandai dengan ketidakpercayaan dengan munculnya kasus penyadapan dan ketegangan hubungan diplomatik. Kehadiran FPDA sendiri juga menjadi salah satu batu sandungan sebab landasan awal FPDA dibangun untuk “mengimbangi Indonesia” belum berubah. Hal ini menjadi ganjalan bagi kerjasama yang lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pertahanan dan kepentingan Indonesia kepada kelima negara anggota FPDA (2000-2017) dengan menggunakan teori diplomasi, politik luar negeri, kepentingan nasional serta konsep kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif-analitik. Penelitian menyajikan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia telah dilakukan secara aktif pada periode 2000-2017 dengan memprioritaskan pada pembangunan kepercayaan (CBM) dengan melaksanakan 5 bentuk diplomasi pertahanan kepada FPDA (kerjasama bilateral dan multilateral, penempatan athan, pelatihan dan pemberian keahlian, kontak dan pertukaran, penugasan personal, serta latihan militer). Namun demikian, insiden ketidakpercayaan tetap saja muncul karena kelima negara anggota FPDA memiliki pandangan yang salah tentang Indonesia dimana Indonesia dipandang sebagai ancaman. Indonesia juga memiliki kepentingan kepada FPDA maupun negara anggotanya, yakni: mengubah pandangan FPDA terhadap Indonesia, membangun CBM, meningkatkan kerjasama bidang maritim, meredam isu separatisme Papua, dan menjaga sentralitas ASEAN.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, FPDA, Kepentingan Nasional

Abstract -- Indonesia has been long established her diplomatic relation and cooperation with the five member states of FPDA (UK, Australia, New Zealand, Malaysia and Singapore), but these relations are still marked by mistrust with the appearance of tapping incidents and raising tensions on diplomatic relations. The presence of FPDA itself has also become one of the stumbling blocks because the initial foundation of FPDA was built to "offset Indonesia" has not yet changed and this has become an

¹ Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Meraih gelar Magister Pertahanan pada 2018.

² Penulis adalah Kepala BPPK Amerika-Eropa Kementerian Luar Negeri, Dosen Prodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, dan pembimbing pertama.

³ Penulis adalah Guru Besar di Universitas Pertahanan. Mantan Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan dan pembimbing kedua.

obstacle in making better cooperation. The problem of this research is how does Indonesian defense diplomacy and interest to the five member states of FPDA (2000-2017) by using the theories of diplomacy and foreign policy, national interest and the concepts of defense cooperation and defense diplomacy. This research uses qualitative method with descriptive-analytic method. The study shows that Indonesia's defense diplomacy has been held actively in the period 2000-2017 by prioritizing on trust building (CBM) by carrying out 5 forms of defense diplomacy to the FPDA (bilateral and multilateral cooperation, appointment of defence attache, training and expertise, contacts and exchanges, personal assignments, and military exercises) . Nevertheless, the incidence of distrust persists because of the five FPDA member states have a false view of Indonesia where Indonesia is seen as a threat. Indonesia also has a vested interest in FPDA and its member states: changing the FPDA's view of Indonesia, building CBM, enhancing maritime cooperation, reducing the issue of Papuan separatism, and maintaining the centrality of ASEAN.

Keywords: Defence Diplomacy, FPDA, National Interest

Pendahuluan

Indonesia telah menetapkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia di bawah pemerintahan Jokowi. Visi ini harus di dorong dari berbagai arah. Namun, fakta yang ada saat ini menunjukkan masih terdapat tingginya potensi konflik *interstate* (konflik antarnegara) serta timbul 'trust deficit' atau 'defisit kepercayaan' di kawasan⁴. Kondisi demikian mendorong Indonesia untuk berupaya menciptakan kondisi damai dan mencapai stabilitas kawasan karena terkait erat dengan kepentingan nasional serta prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam negeri⁵.

Indonesia sendiri memiliki masalah kepercayaan yang di bawa dari sejarah masa lalu dengan sebuah koalisi

keamanan regional. Koalisi ini di bentuk oleh kumpulan negara-negara anggota persemakmuran Inggris yang berada di area Asia Pasifik. Koalisi tersebut ialah Five Power Defence Arrangements (FPDA). FPDA merupakan hubungan pertahanan yang terbentuk melalui persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971⁶.

Pada mulanya, FPDA terbentuk sebagai bentuk tanggung jawab pertahanan Inggris atas Malaysia dan Singapura akibat pilihan Inggris di tahun 1967 untuk menarik pasukan dari timur Suez⁷. Inggris melihat penarikan pasukannya dari Terusan Suez merupakan

⁴ Kementerian Luar Negeri, *Rencana Strategis Kemlu 2015-2019*, (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016), hlm.15

⁵ ibid

⁶ Ian, Storey, Ralf, Emmers, & Daljit, Singh, *Five Power Defence Arrangements at Forty*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2011), hlm.xvi

⁷ Damon, Bristow, "The Five Power Defence Arrangements Southeast Asia Unknown Regional Security", *Contemporary Southeast Asia*, Vol.27, No.1, April 2005, hlm.2

sebuah kekalahan yang membuat citra Inggris jatuh. Hal ini kemudian mendorong Inggris untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia. Kemamuan Inggris untuk mempertahankan wilayah Asia dikarenakan oleh perubahan situasi politik konservatif di Inggris pada bulan Juni 1970. Saat itu, Perdana Menteri Ted Heath membuat sebuah pernyataan lugas bahwa pemerintahannya akan mempertahankan kehadiran militer di kawasan Asia Tenggara yang berkebalikan dengan kebijakan Inggris di Terusan Suez, yakni tidak memberikan sinyal akan berkomitmen secara militer disana⁸. Bisa disimpulkan, terbentuknya FPDA merupakan salah satu bentuk implementasi dari keunikan nilai anggota negara-negara persemakmuran, yakni kontinuitas sejarah yang tidak terputus, loyalitas anggota yang erat satu sama lain, solidaritas terhadap negara anggota mereka yang menjadi perhatian bersama terutama dalam menangani suatu masalah pelik, serta ikatan kontrak konstitusional yang tumbuh di dalam

keluarga Persemakmuran⁹. Kelima negara FPDA berkomitmen juga untuk saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap Malaysia, Australia, Selandia Baru, atau Singapura¹⁰.

Pembentukan FPDA menjadi sebuah implementasi komitmen bagi negara-negara persemakmuran di kawasan Asia, sekaligus menjadi titik krusial bagi Indonesia. Pembentukan FPDA krusial bagi Indonesia sebab dilatarbelakangi oleh pembentukan gerakan oposisi Presiden Soekarno atas pembentukan Federasi Malayasia pada bulan September 1963. Sikap menentang ini kemudian diimplementasikan dengan mengadakan reli anti Malaysia di Jogjakarta pada tanggal 25 September¹¹. Oleh karena itu, meskipun telah lahir sebuah organisasi regional pada bulan Agustus 1967, yakni Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN (*'The Association of Southeast Asian Nations'*) dengan Singapura dan Malaysia juga ikut di dalam keanggotaannya, hal ini ternyata tidak kunjung membuat hubungan anggota FPDA dengan Jakarta sepenuhnya pulih,

⁸ Andrea, Benvenuti, & Moreen, Dee, "The Five Power Defence Arrangements and The Reappraisal of The British and Australian Policy Interest in Southeast Asia", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.41, No.1, 2010, hlm.103-104

⁹H. Duncan, Hall, "The British Commonwealth of Nations". *The American Political Science Review*, Vol. 47, No.4, Desember 1953, hlm. 997

¹⁰ Op.cit, Damon, Bristow, hlm.5

¹¹ J. Soedjati, Djiwandono, *Konfrontasi Revisited: Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 46

bahkan hubungannya terus ditandai dengan ketidakpercayaan oleh karena Indonesia menjadi rujukan atau alasan ketika pertama kali FPDA didirikan¹².

Kemerosotan hubungan bilateral Indonesia dengan negara anggota FPDA ditandai dengan berbagai kasus genting. Pertama, kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap kepala negara beserta ibu negara Indonesia (Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono), pengusiran oleh Angkatan Laut (AL) Australia terhadap pencari suaka ke perairan Indonesia, serta pelanggaran kapal perang AL Australia terhadap wilayah perairan Indonesia di Selatan Jawa sampai dengan 8 NM¹³. Tidak hanya itu saja, laporan resmi militer Australia menunjukkan bahwa AL Australia telah sebanyak enam kali melanggar wilayah perairan Indonesia terhitung pelanggaran maritim dilakukan sejak Desember 2013 hingga Januari 2014 melalui operasi keamanan perbatasan yang tertulis pada laporan resmi tanggal 19 Februari 2014¹⁴. Belum lagi, Indonesia menderita kerugian dengan diberlakukannya kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott dalam

menyikapi immigran yang mencari suaka di negaranya atau lebih dikenal dengan “*Turn Back The Boat*”¹⁵. Kebijakan ini memberlakukan pemberian kapal gratis kepada pengungsi untuk kembali ke perairan Indonesia.

Kedua, pengaturan kolom udara yang sudah sejak lama dirasakan dengan Singapura atau yang dikenal dengan nama permasalahan FIR (*Flight Information Region*). Hingga sekarang, pengaturan lalu lintas udara di atas Pulau Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna masih berada dibawah kendali Air Traffic Control (ATC) Singapura berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan pada tahun 1955. Permasalahan muncul akibat Singapura tidak mengizinkan Indonesia terbang langsung melewati daerahnya sendiri¹⁶.

Ketiga, Edward Snowden membocorkan data rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dengan menyebutkan Singapura memegang peranan penting dalam penyadapan yang dilakukan oleh jaringan

¹² Loc.cit, Ian, Storey, Ralf, Emmers, & Daljit, Singh

¹³ A.Y, Antariksa, “Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan”. *Jurnal Pertahanan*, Vol. 4, No.2, Agustus 2014, hlm.3

¹⁴ Ibid, hlm. 3

¹⁵ Kementerian Pertahanan, Strathan, *Perkembangan Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Dalam Lima Tahun Mendatang*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015), hlm.15

¹⁶ Syaiful, Anwar, “Peran Diplomasi dalam Mengatasi Tantangan Diplomasi di Bidang Pertahanan”. *Jurnal Pertahanan*, Vol.4, No.2, Agustus 2014, hlm.73-74

intelijen Amerika Serikat dengan Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau yang dikenal dengan nama Five Eyes. Jaringan Fairfax Media menyatakan Divisi Intelijen Kementerian Pertahanan Singapura berkerjasama dengan Australia Signal Directorate (ASD) melalui pengaksesan kabel bawah laut SEA-ME-WE-3. Kabel bawah laut ini berguna untuk membagi informasi komunikasi dengan menghubungkan Singapura dan Perth. Indonesia menjadi sasaran utama pada penyadapan yang telah dilakukan sejak tahun 1970-an ini¹⁷.

Terakhir, hubungan Indonesia dan Malaysia memburuk akibat implementasi kebijakan pemberantasan *illegal fishing*. Pemberantasan pencurian ikan dilaksanakan dengan menenggalamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Indonesia sendiri telah menangkap 200 kapal nelayan Malaysia¹⁸. Malaysia kemudian menganggap realisasi kebijakan ini sebagai tindakan meneruskan

pendekatan konfrontasi dengannya. Berdasarkan tulisan Bridget Welsh peneliti senior *Center for East Asia Democratic Studies* di Universitas Nasional Taiwan, menyebutkan bahwa Malaysia cukup terkejut dengan perubahan kebijakan Jokowi. Indonesia dahulu tidak pernah diperhitungkan menjadi ancaman bagi Malaysia, kini dapat¹⁹.

Rumusan permasalahan dari tulisan menyoroti berbagai aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral kepada negara anggota FPDA untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan membuat FPDA sebagai perkumpulan yang lebih terbuka setelah di terpa berbagai kasus. Selain itu di kaji juga kepentingan Indonesia membangun hubungan dengan kelima negara FPDA ini. Pertanyaan besar dalam permasalahan penelitian ini ialah bagaimana diplomasi pertahanan dan kepentingan Indonesia dengan kelima negara anggota FPDA periode 2000-2017? Demi mendukung pertanyaan ini juga mencakup pertanyaan pendukung, yakni:

- 1) Bagaimana pelaksanaan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia kepada kelima negara FPDA pada tahun 2000-2017 ?

¹⁷Prihandoko, . *SBY Minta Penjelasan Singapura Soal Penyadapan*, 23 November 2013, dari Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532682/sby-minta-penjelasan-singapura-soal-penyadapa>, diakses November 15, 2016

¹⁸Kementerian Pertahanan, Strathan, *Kebijakan Poros Maritim Terhadap Negara-Negara Tetangga*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015), hlm. 27

¹⁹ Ibid, hlm. 28-30

2) Bagaimana kepentingan diplomasi pertahanan Indonesia kepada koalisi pertahanan FPDA dan kerjasama pertahanan kepada kelima negara anggotanya?

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder sebagai bahan dasar sekaligus utama. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan sejarah FPDA dari awal pembentukan hingga kiprahnya sekarang, politik luar negeri Indonesia, dan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan kelima negara anggota FPDA dari tahun 2000-2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekni wawancara terstruktur dan studi pustaka. Model Miles dan Huberman digunakan sebagai teknik analisis data dengan komponen analisis, yakni: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan dan keterandalan data kemudian dilakukan melalui triangulasi data.

Faktor Pendorong Hubungan Bilateral

Setiap negara menguatkan hubungannya dengan negara lain melalui hubungan bilateral. Meninjau lebih dalam alasan mengapa penting bagi Indonesia untuk memiliki hubungan bilateral dengan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris dapat dilihat melalui konsep diplomasi bilateral yang diajukan oleh Kishan Rana²⁰, yakni:

Faktor pertama, melihat pada tujuan keamanan (Security Objectives). Keamanan nasional adalah prioritas utama bagi negara dalam membentuk hubungan eksternalnya. Buku Doktrin Pertahanan 2014 menyebutkan bahwa tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari bentuk ancaman²¹. Indonesia memiliki posisi yang strategis yakni berada pada persilangan antara dua benua, dua samudera, dua ideologi, dua penghasil komoditas, dua penghasil energi, dua kubu nuklir, dua anggota DK²² dan non-DK PBB. Oleh

²⁰ Kishan A, Rana, *Bilateral Diplomacy*. (New Delhi: Manas Publications, 2002), hlm. 36-37

²¹ Doktrin Pertahanan. (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2014), hlm.xix

²² DK PBB adalah Dewan Keamanan PBB. Anggota tetap DK PBB terdiri dari lima negara besar yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Mereka memiliki hak veto.

sebab itu, Indonesia menyadari untuk mengamankan dan mempertahankan NKRI juga harus melibatkan kerjasama dengan negara lain agar tujuan keamanan dan pertahanannya tercapai.

Berdasarkan penjelasan posisi strategis di atas, maka hubungan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Australia menjadi sangat penting. Ketiga negara ini berbatasan langsung dengan Indonesia. Konsekuensinya, Indonesia memiliki tujuan keamanan yang harus ditegakkan, yakni menjaga kedaulatan teritorial agar tetap utuh. Upaya menjaga keutuhan wilayah secara otomatis akan membuat Indonesia aktif berinteraksi dengan ketiga negara ini, supaya keamanan perbatasan dapat terus diperjuangkan. Sedangkan untuk Selandia Baru dan Inggris yang secara geografis berjauhan, kedekatan jaraknya dilihat dari tujuan keamanan bersama. Tujuan bersamanya ialah menjaga stabilitas Kawasan Asia Pasifik agar tidak terjadi goncangan yang dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia atau mereka.

Faktor Kedua, Lingkungan (*Neighborhood*). Pengelolaan hubungan dengan negara-negara tetangga selalu menjadi tantangan diplomatik pertama.

Maka dari itu, dengan melihat kedekatan letak, Indonesia seyogyanya mengadakan diplomasi bilateral dengan Singapura, Malaysia, dan Australia. Alasannya ialah jika kedekatan lingkungan ini di kelola dengan baik, maka membantu untuk membentuk platform kerjasama yang baik dan kompleks dalam menangani isu internal maupun eksternal di kawasan. Kedekatan lingkungan bukan saja menguatkan persahabatan, tetapi juga menimbulkan persaingan. Persaingan yang paling terlihat adalah di bidang pertahanan pada aspek kapabilitas. Hal ini kemudian menimbulkan friksi negatif di antara negara, sehingga membutuhkan peran dialog. Tujuannya untuk menginformasikan pertimbangan peningkatan alutsista. Transparansi yang baik akan serta merta meningkatkan kepercayaan.

Posisi Selandia Baru dan Inggris secara jarak memang tidak akan berpengaruh langsung terhadap Indonesia. Namun, memperhitungkan kedekatan Selandia Baru dengan negara-negara Pasifik membuat fakta ini menjadikannya strategis bagi Indonesia²³. Inggris pun memiliki nilai strategis bagi Indonesia meskipun letaknya di Benua

²³ Riaz, Saihu, Komunikasi personal, 29 Desember 2016

Eropa. Nilai strategis ini terletak pada kedekatan Inggris dengan negara persemakmurnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, kemampuannya dalam Industri Pertahanan, dan posisi Inggris sebagai anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto membuat Indonesia ikut menjalin hubungan bilateral dengan Inggris.

Faktor ketiga, adanya cita-cita bersama (*Shared Ideals*). Indonesia memiliki pandangan sebagai negara yang cinta damai dengan merujuk pada salah satu kepentingan nasionalnya yakni ikut menjaga ketertiban dunia. Buku Doktrin Pertahanan 2014 menyebutkan penyelenggaraan perdamaian yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tentram, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global²⁴. Maka dari itu, Indonesia melihat Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris juga mempunyai cita-cita yang sama untuk membangun dunia yang damai serta mendukung kestabilan dan ketertiban di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dengan mendukung ASEAN sebagai porosnya. Dengan demikian, Indonesia memandang penting untuk

membangun hubungan dengan kelima negara anggota FPDA ini.

Faktor keempat, adanya antagonisme yang sama (*Mutual Antagonism*).

Sejarah menunjukkan, melalui peristiwa Konfrontasi dan sikap antipati yang terjadi antara Indonesia dan kelima negara anggota FPDA telah membentuk hubungan dengan cara yang tidak bersahabat. Namun, setelah perang dingin berakhir, dunia menjadi lebih dinamis. Musuh masa lalu bisa menjadi mitra kerjasama, bahkan saat kekhawatiran terus berlanjut. Adanya antagonisme yang sama akibat luka di masa lalu terus mendorong Indonesia untuk menjalin hubungan secara bilateral dengan kelima negara anggota FPDA. Posisi geografis negara tidak hanya dijadikan acuan tetapi juga menimbang tujuan penyelenggaraan perdamaian Indonesia pada lingkup global. Buku doktrin pertahanan menjelaskan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman²⁵. Luka masa lalu ini kemudian menjadi daya dorong untuk menjalin

²⁴ Op.cit, hlm. xx

²⁵ ibid

diplomasi bilateral dengan kelima negara FPDA ini agar Indonesia tidak dipandang sebagai ancaman tapi mitra dalam berkerjasama.

Faktor kelima, adanya minat yang sama (*Matching Interests*). Indonesia melihat kelima negara anggota FPDA memiliki interes dalam bidang pertahanan untuk berkerjasama dalam menangkal tindak terorisme, khususnya pada masalah radikalisme, kembalinya foreign fighters dari Suriah, dan keamanan maritim. Terorisme menjadi masalah penting di semua negara sebab ia masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban jiwa. Keamanan maritim menjadi sorotan isu internasional dua tahun belakangan ini akibat kasus pembajakan dan penyanderaan di laut pada Laut Sulu dan Selat Malaka. Selain itu, kemandirian maritim juga menyangkut masalah ekonomi yakni perdagangan.

Laut Indonesia merupakan jalur *choke point* bagi kelima negara FPDA dalam kegiatan perdagangan. Oleh sebab

itu, Indonesia menyadari bahwa keamanan regional juga harus di capai dengan berkolaborasi bersama negara lain. Adanya minat yang sama menjadi kekuatan dasar bagi suatu hubungan yang langgeng.

Pelaksanaan Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Kelima Negara Anggota FPDA

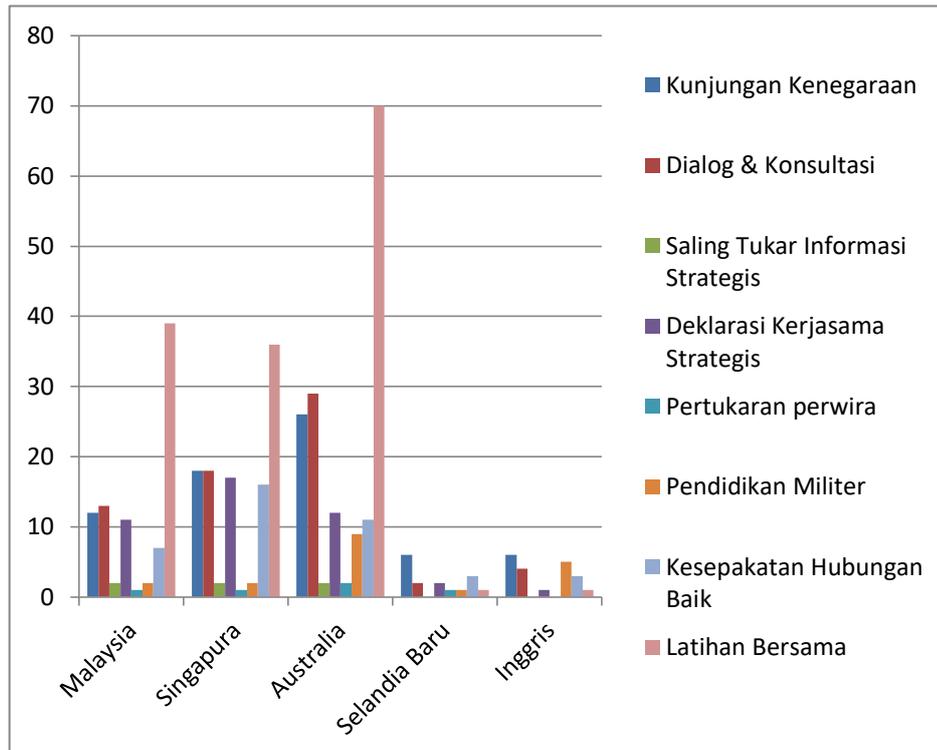
Upaya Indonesia membangun hubungan baik dengan kelima negara FPDA tidak hanya berhenti pada ranah diplomasi bilateral secara umum saja. Indonesia juga telah melaksanakan diplomasi pertahanan sebagai penunjan kegiatan hubungan bilateral kepada kelima negara anggota FPDA. Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan kepada kelima negara anggota FPDA dari kurun waktu 2000 hingga 2017 dapat ditelaah berdasarkan kategori bentuk-bentuk diplomasi pertahanan yang diajukan Cottey dan Forster, sebagai berikut:

Tabel. 1 Bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2000- 2017 No	Bentuk Diplomasi Pertahanan	yang sudah dilaksanakan Indonesia kepada				
		MAL	SG	AUS	SB	ING
1	Kerjasama bilateral & multilateral antara perwira senior dan pejabat sipil dari kementerian pertahanan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penempatan Atase Pertahanan di negara-negara sahabat	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pelatihan terhadap perwira militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pemberian keahlian dan saran pada kontrol angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer	✓	✓	✓	✓	✓
5	Kontak dan pertukaran antara personel militer dan unit serta kunjungan kapal perang	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penempatan personel militer atau sipil di negara-negara mitra pada kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata	-	-	-	-	-
7	Penugasan untuk latihan atau pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyediaan peralatan militer dan bantuan militer lainnya	✓	-	-	-	-
9	Latihan militer bilateral dan multilateral untuk tujuan pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Diplomasi Pertahanan Indonesia telah melaksanakan tujuh bentuk diplomasi pertahanan yang dikategorikan oleh Cottey dan Forster. Dua bentuk tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk penempatan personel militer atau sipil pada Kementerian Pertahanan atau Angkatan Bersenjata

hanya baik dilakukan pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi. Politik luar negeri Indonesia tidak memperbolehkan Indonesia untuk beraliansi. Walaupun tidak ada penempatan personel militer atau mitra di dalam kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata Indonesia, Indonesia menawarkan bentuk



Gambar. 1 Kegiatan Diplomasi Pertahanan Bilateral Indonesia kepada kelima negara anggota FPDA Tahun 2000-2017
Sumber: diolah oleh peneliti

lain yakni memperbolehkan personel militer atau sipil asing dari negara mitra untuk melanjutkan studi srata dua di Universitas Pertahanan yang dikelola dibawah Kementerian Pertahanan. Australia dalam aspek ini rutin mengirimkan personelnnya untuk belajar di sana. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan (CBM) kepada negara mitra.

Pelaksanaan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia yang telah dilaksanakan Indonesia memang berfokus pada tujuan peningkatan kepercayaan atau CBM kepada kelima negara anggota

FPDA pada kurun waktu 2000-2017. Penelitian ini berdasarkan pada hasil analisis data primer dan sekunder menggunakan kategori CBM menurut Idil Syawfi²⁶. Ragam kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia yang telah dilaksanakan lebih didominasi pada kegiatan seperti kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, dan latihan bersama. Ragam kegiatan ini

²⁶ Idil, Syawfi, *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan (2003-2008)*, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm.16

menunjukkan adanya prioritas kepada peningkatan kepercayaan yang lebih kepada kelima negara anggota FPDA.

Data di atas menunjukkan bahwa aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia paling aktif berkegiatan membangun kepercayaan dengan Malaysia, Singapura, dan Australia, dibandingkan dengan Selandia Baru dan Inggris. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Australia. Implikasinya, ketiga negara ini menjadi perhatian khusus Indonesia dalam membangun CBM, khususnya menyelesaikan masalah perbatasan dan menanggulangi ancaman regional.

Pelaksanaan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia dengan kelima negara FPDA tertinggi adalah dengan Australia. Australia adalah mitra strategis Indonesia di bidang pertahanan. Posisi ini ditunjukkan Indonesia dengan menempatkan Atase Pertahanan berpangkat Brigadir Jenderal sedangkan keempat negara lainnya hanya berpangkat Kolonel. Pada konteks FPDA, Australia di pandang sebagai kekuatan utama sebab Inggris kini tidak terlalu menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia.

Diplomasi pertahanan Indonesia yang dikembangkan secara bilateral berguna untuk membangun hubungan baik guna mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Ketidakpastian sangat mungkin apalagi dengan kendinamisan lingkungan strategis. Maka dari itu, ketidakpastian ini diimbangi dengan melakukan kontak antar angkatan bersenjata dalam wujud kerjasama pertahanan, khususnya dengan kelima negara anggota FPDA yang memiliki pola hubungan pasang surut. Kerjasama pertahanan ini termaktub pada kerjasama dalam level strategis, taktis, dan operasional, yang pada umumnya paling sering diaplikasikan melalui latihan bersama atau gabungan.

Menurut Cottey dan Forster, kerjasama pertahanan bertujuan sebagai sarana untuk memperkenalkan transparansi dalam menjalin hubungan pertahanan, khususnya berkaitan dengan niat dan kapabilitas negara²⁷. Pada level taktis dan operasional cara untuk meningkatkan transparansi antara angkatan bersenjata ialah dengan

²⁷ Andrew, Cottey, & Anthony, Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (Vol. Adelphi Paper 365), (London: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 16

melakukan latihan bersama atau gabungan.

Kegiatan CBM yang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan ketidakpastian, kesalahan persepsi, dan kecurigaan dan dengan demikian mengurangi kemungkinan konflik bersenjata dan ketegangan²⁸, ternyata belum tercapai dengan baik dilihat dari kasus-kasus ketidakpercayaan yang mencuat pada rentang tahun 2000-2017 dari kelima negara anggota FPDA. Faktor ketidakpercayaan ini masih mewarnai hubungan Indonesia dengan kelima negara.

Tujuan diplomasi pertahanan Indonesia untuk menghilangkan permusuhan serta membangun dan menjaga kepercayaan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini disebabkan kelima negara FPDA masih memiliki pandangan yang salah dengan Indonesia akibat luka masa lalu yang melihat Indonesia sebagai negara yang ekspansionis. Pandangan salah yang berkembang dimasyarakat ini terutama datang dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia yakni Malaysia, Singapura, dan Australia.

²⁸ J. Soedjati, Djiwandono, "Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy: A Southeast Asian Perspective". Dalam J, Wanadi, *Regional Security Arrangements* (hal 81-92). (Jakarta: CSIS,1996), hlm.85

Warga Australia menginginkan hubungan yang erat dengan Indonesia, namun mereka merasa ada perbedaan yang besar antara Indonesia dan Australia sehingga hal ini memicu kecemasan Indonesia sebagai ancaman. Pada tahun 2013, DFAT menugaskan Newspoll untuk melaksanakan survey untuk menyelidiki sikap Australia terhadap Indonesia. Polling ini menemukan bahwa sebesar 83% setuju bahwa Indonesia adalah penting untuk Australia, dengan 94% setuju agar Australia membangun hubungan dekat dengan Indonesia, namun sekaligus polling ini juga memperlihatkan bahwa 44% warga Australia merasa bahwa Indonesia adalah ancaman bagi keamanan nasional Australia karena luas wilayah Indonesia, Indonesia dipandang bukan negara demokrasi tetapi negara Islam yang menyebabkan banyak sarang teroris hadir disana²⁹. Poling Lowly Institute menunjukkan bahwa hanya 27% masyarakat Australia yang setuju bahwa Indonesia adalah negara demokrasi³⁰. Sedangkan, Singapura melihat Indonesia sebagai tantangan keamanan potensial

²⁹ DFAT/Newspoll, "Australian Attitudes towards Indonesia: Report", *Newspoll*, 2013, hlm. 13-14.

³⁰ Alex, Oliver, *Lowly Institute Poll 2017*, dari Lowly Institute Poll: (<https://www.lowlyinstitute.org/publications/2017-lowly-institute-poll>), diakses Oktober 18, 2017

sebagai akibat dari perbedaan ukuran dan kekuatan populasi³¹. Pandangan salah oleh Malaysia diperoleh akibat peran media masa dan media online Indonesia yang dipandang tidak menunjukkan sikap berteman kepada Malaysia, khususnya pada isu perbatasan. Malaysia takut karakter ekspansionis Indonesia muncul kembali. Perang adu argumen pada media online semakin memperparah pandangan yang salah pada masyarakat Malaysia kepada Indonesia³². Berdasarkan hal diatas, Indonesia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah lagi ancaman bagi mereka. Indonesia membuktikan melalui pemberian pernyataan bahwa FPDA bukan dianggap sebagai ancaman dalam pertemuan Trilateral dengan dua negara anggota FPDA dan ASEAN yakni Malaysia dan Singapura yang disambut baik oleh keduanya³³. Meskipun demikian, FPDA belum memberikan pernyataan langsung

bahwa Indonesia bukanlah lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi FPDA lebih memilih untuk mengundang Indonesia sebagai pengamat dalam kegiatan latihan bersama mereka.

Kepentingan Diplomasi Pertahanan Indonesia kepada koalisi pertahanan FPDA dan hubungan bilateral kepada kelima negara anggotanya

Machiavelli menyatakan bahwa kepentingan nasional memiliki empat dasar di dalamnya, yakni: kepentingan bangsa dan warga negara adalah hal yang utama, resiko berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan ditiadakan, negara akan berkerjasama dengan negara lain, dan negara tidak mengikutsertakan rakyat dalam perang kecuali terjadi hal yang mendesak³⁴. Pada elemen ketiga, disebutkan bahwa negara berkerjasama dengan negara lain guna mencapai kepentingan nasional, maka Indonesia sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan dengan negara lain menyadari bahwa negara lain baik itu mitra atau belum menjadi mitra juga memiliki kepentingan terhadap kerjasama yang dijalin dengan Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki satu kepentingan

³¹ Sebastian, L. C. (2017, September 7). *Defence ties at the heart of Singapore-Indonesia partnership*. Diakses September 25, 2017, dari The Strait Times: <http://www.straitstimes.com/opinion/defence-ties-at-the-heart-of-spore-indonesia-partnership>

³² I, Irwansyah, Border Issue: "Misperception between Indonesia and Malaysia". *SHS Web of Conferences*, 1-6, 2017, hlm.4

³³ Caroline, S. (2017, Maret 1). *Trilateral Meeting Sekjen Kemhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura*. Diakses Juni 29, 2017, from KBRI Kuala Lumpur: <http://kbrikualalumpur.org/w/2017/03/01/pertemuan-trilateral-meeting-sekjen-kemhan-indonesia-malaysia-dan-singapura/>

³⁴ Robert, Jackson, & Georg, Sørensen, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2007), hlm.206

kepada FPDA yakni memastikan posisi Indonesia berubah di mata FPDA dan empat kepentingan terhadap kelima negara anggota FPDA, yakni: meningkatkan CBM kepada kelima negara anggota FPDA, memperluas kerjasama pertahanan bidang maritim, meredam isu separatisme, dan menjaga sentralitas ASEAN

Berdasarkan kelima kepentingan diplomasi pertahanan yang ingin dicapai Indonesia, kepentingan diplomasi pertahanan Indonesia pada poin satu, dua, dan tiga sudah terealisasi dengan cukup baik. Indikator terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat pada kepentingan nasional pertama yakni memastikan posisi Indonesia berubah di mata FPDA terlaksana walaupun belum secara penuh dengan melihat pada hasil rapat FDMM (FPDA Defence Ministers Meeting) ke-10 setelah Indonesia memenuhi undangan sebagai pengamat di tahun 2016 yang menghasilkan kesepakatan untuk terus meningkatkan program pengamat ('observer') dari anggota non-FPDA³⁵.

³⁵ Ministry of Defence Singapore. (2017, Juni 2). *FPDA Defence Ministers: FPDA Integral in Ensuring Security and Confidence-Building in the Region*. Diakses Oktober 12, 2017, from Ministry of Defence Singapore: [https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room](https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/details.html?name=02jun17_nr2&date=2017-06-02#.WfkOdLUxXIU)

Peningkatan program pengamat ini bukan hanya memenuhi kepentingan FPDA untuk melakukan transparansi tetapi sekaligus memberi sinyal halus kepada Indonesia bahwa Indonesia tidak dipandang sebagai Indonesia yang dahulu melainkan mitra bagi integritas keamanan kawasan. Selain itu, Indonesia melalui pendekatan saudara ASEAN dengan Singapura dan Malaysia telah menyatakan di dalam pertemuan Trilateral bahwa FPDA bukanlah ancaman bagi Indonesia. Pernyataan ini membuat ketegangan berlarut dengan FPDA, perlahan-lahan dapat diubah sehingga FPDA juga dapat merubah pandangannya terhadap Indonesia.

Berdasarkan lima kepentingan diplomasi pertahanan Indonesia kaitannya dengan kelima negara anggota FPDA yakni Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Singapura, maka jika dikategorikan dalam tiga strata kepentingan nasional (TingNas) Indonesia sesuai dengan penjabaran dalam Buku Putih ialah kepentingan meredam isu separatisme, meningkatkan CBM kepada kelima negara anggota FPDA, dan memperluas kerjasama pertahanan bidang maritim dikategorikan sebagai

[/details.html?name=02jun17_nr2&date=2017-06-02#.WfkOdLUxXIU](https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/details.html?name=02jun17_nr2&date=2017-06-02#.WfkOdLUxXIU)

kepentingan mutlak sebab menyangkut kelangsungan Negara Republik Indonesia, berupa Integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Terwujudnya kerja sama internasional secara bilateral maupun multilateral dalam rangka CBM dapat memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta mengatasi isu-isu keamanan bersama melalui dialog pertahanan dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Sedangkan kepentingan nasional untuk mengubah pandangan FPDA terhadap Indonesia dan menjaga sentralitas ASEAN masuk dalam kategori pendukung karena kedua kepentingan ini berupaya untuk mendukung perdamaian dunia. Buku doktrin pertahanan menjelaskan bahwa penyelenggaraan perdamaian bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman³⁶.

Kesimpulan

Diplomasi Pertahanan Indonesia sejak tahun 2000-2017 telah dilaksanakan dengan prioritas tujuan pada pembangunan kepercayaan (CBM) daripada untuk kapabilitas dan industri pertahanan. Hal ini dilihat dari besarnya intensitas pelaksanaan kegiatan yang lebih didominasi oleh kegiatan kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, dan latihan bersama. Berdasarkan Cottey dan Forsters, Indonesia juga telah melaksanakan 5 bentuk diplomasi pertahanan kepada FPDA (kerjasama bilateral dan multilateral, penempatan athan, pelatihan dan pemberian keahlian, kontak dan pertukaran, penugasan personal, serta latihan militer). Latihan bersama menjadi prioritas Indonesia karena terbukti efektif meningkatkan komunikasi.

Ada lima kepentingan diplomasi pertahanan Indonesia kepada FPDA dan negara anggotanya, yakni: mengubah pandangan FPDA terhadap Indonesia, membangun CBM, meningkatkan kerjasama bidang maritim, meredam isu separatisme Papua, dan menjaga

³⁶ ibid

sentralitas ASEAN yang semuanya mengarah kepada pemenuhan stabilitas kawasan

Saran

- 1) Meningkatkan program capacity building yang bersifat militer maupun nir-militer dalam program kerjasama bilateral dengan negara anggota FPDA, seperti mengirimkan dosen yang berkompeten dalam bidang perikanan untuk mendukung pertahanan maritim Indonesia
- 2) Meningkatkan komunikasi Athan Indonesia untuk mengubah pandangan FPDA
- 3) Meningkatkan program latihan bersama untuk membuka banyak peluang berkomunikasi dengan kelima negara FPDA
- 4) Meningkatkan diplomasi publik dan aktif menggunakan media untuk mengubah persepsi dan pandangan mengenai Indonesia
- 5) Lebih aktif berpartisipasi sebagai pengamat FPDA dalam berbagai kegiatan dengan selalu memastikan untuk disertakan dalam latma FPDA dan harus selalu mengikutinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Storey, I., Emmers, R., & Singh, D. (2011). *Five Power Defence Arrangements at Forty*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies
- Strathan, K. (2015). *Perkembangan Hubungan Bilateral Australia Indonesia Dalam Lima Tahun Mendatang*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Strathan. (2015). *Kebijakan Poros Maritim Terhadap Negara-Negara Tetangga*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Tesis

- Syawfi, I. (2009). *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan (2003-2008)*. Depok: Universitas Indonesia.

Jurnal

- Antariksa, A. Y. (2014, Agustus). "Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan". *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 1-24.
- Anwar, S. (2014, Agustus). "Peran Diplomasi dalam Mengatasi Tantangan Diplomasi di Bidang Pertahanan". *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 71-93.
- Benvenuti, A., & Dee, M. (2010). "The Five Power Defence Arrangements and The Reappraisal of The British and Australian Policy Interest in Southeast Asia". *Journal of Southeast Asian Studies*, 41(1), 101-123.
- Bristow, D. (2005, April). "The Five Power Defence Arrangements Southeast Asia Unknown Regional

- Security". *Contemporary Southeast Asia*, 27(1),1-20.
- DFAT/Newspoll (2013) Australian Attitudes towards Indonesia: Report", *Newspoll*, 13-14.
- Hall, H. D. (1953, Desember). "The British Commonwealth of Nations". *The American Political Science Review*, 47(4), 997-1015.
- Irwansyah, I. (2017). Border Issue: "Misperception between Indonesia and Malaysia". *SHS Web of Conferences*, 1-6.
- Dokumen**
- Kementerian Luar Negeri. (2016). *Rencana Strategis Kemlu 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Pertahanan. (2014). *Doktrin Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Internet**
- Caroline, S. (2017, Maret 1). *Trilateral Meeting Sekjen Kemhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura*. Diakses Juni 29, 2017, from KBRI Kuala Lumpur: <http://kbrikualalumpur.org/w/2017/03/01/pertemuan-trilateral-meeting-sekjen-kemhan-indonesia-malaysia-dan-singapura/>
- Ministry of Defence Singapore. (2017, Juni 2). *FPDA Defence Ministers: FPDA Integral in Ensuring Security and Confidence-Building in the Region*. Diakses Oktober 12, 2017, from Ministry of Defence Singapore: https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/details.html?name=02jun17_nr2&date=2017-0602#.WfkOdLUxXIU
- Oliver, A. (2017). Lowly Institute Poll 2017. Diakses Oktober 18, 2017, from Lowly Institute Poll: <https://www.lowyinstitute.org/publications/2017-lowy-institute-poll>
- Sebastian, L. C. (2017, September 7). *Defence ties at the heart of Singapore- Indonesia partnership*. Diakses September 25, 2017, from The Strait Times: <http://www.straitstimes.com/opinion/defence-ties-at-the-heart-of-singapore-indonesia-partnership>